

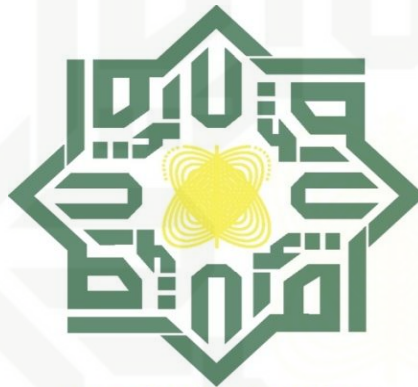


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK AKIBAT PELAKSANAAN
RESTRUKTURISASI KREDIT PADA DEBITUR USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI BANK RAKYAT
INDONESIA CABANG TUANKU
TAMBUSAI PEKANBARU**

SKRIPSI

*Skripsi Diajukan Untuk Meperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)*



UIN SUSKA RIAU

OLEH

NURVANNISA FAJRI MUSTIKA

NIM.11727202118

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

1442 H/ 2021 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *"Perlindungan Hukum Bagi Bank Akibat Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Pada Debitur Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bank Rakyat Indonesia Cabang Tuanku Tambusai Pekanbaru"* yang ditulis oleh:

Nama : NURVANNISA FAJRI MUSTIKA
 NIM : 11727202118
 Program Studi : ILMU HUKUM

dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 April 2021

Pembimbing Skripsi

FIRDAUS. S.H. M.H.
 NIP. 196610021994031002

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "*Perlindungan Hukum Bagi Bank Akibat Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Pada Debitur Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bank Rakyat Indonesia Cabang Tuanku Tambusai Pekanbaru*" yang ditulis oleh :

Nama : **NURVANNISA FAJRI MUSTIKA**
 NIM : 11727202118
 Program Studi : Ilmu Hukum
 telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 24 Juni 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Daring/ Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Juni 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Firdaus, SH., MH

Sekretaris
Basir, SHL., MH

Penguji I
Dr. Abu Samah, MH

Penguji II
Hj. Nuraini Sabu, SH., MH

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajjar, M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005



ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh *Covid-19* yang menambah persentase kesulitan ekonomi masyarakat. 90% pelaku usaha mengalami masalah perekonomian akibat pandemi Covid-19 berdasarkan survei yang dilakukan oleh *Program International Labour Organization* (ILO) mengenai Kesiambungan Daya Saing dan Tanggung Jawab Perusahaan (SCORE) Indonesia. Potensi gagal melunasi kredit oleh UMKM pun semakin tinggi dan terbuka lebar. Hal ini menyebabkan meningkatnya pelaksanaan restrukturisasi kredit dari sektor UMKM di BRI Cabang Tuanku Tambusai Pekanbaru. Namun, pelaksanaannya tentu tidak berjalan mulus karena masih banyak sekali kendala yang menyebabkan terhambatnya kelancaran restrukturisasi kredit ini. Hambatan-hambatan tersebut dapat menyebabkan dampak kepada pihak bank perubahan ekonomi secara keseluruhan yang mempengaruhi masyarakat pengusaha dan hal ini juga akan mempengaruhi kekayaan dari pemilik bank, kreditur bank, dan deposan sehingga akan menimbulkan permasalahan yang cukup sensitif apabila tidak ditangani dengan baik.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan restrukturisasi kredit yang diberikan kepada debitur UMKM dan apa akibat hukum yang timbul apabila restrukturisasi tersebut mengalami kegagalan di BRI Cabang Tuanku Tambusai Pekanbaru. Penelitian ini merupakan jenis penelitian sosiologis, yaitu penelitian lapangan yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yakni melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan angket.

Dari penelitian ini diketahui bahwa restrukturisasi kredit di BRI Cabang Tuanku Tambusai menjadi bentuk penyelamatan kredit yang didahulukan atau yang pertama yang dilakukan oleh pihak bank karena dinilai lebih memberikan keuntungan daripada bentuk penyelamatan kredit yang lain serta dapat menekan kerugian pada bank sekasimam mungkin. Pelaksanaan restrukturisasi kredit pada debitur UMKM di BRI Cabang Tuanku Tambusai sudah berlaku sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang terdapat dalam peraturan mengenai perbankan dan perkreditan. Kendala yang dihadapipun masih tergolong tidak banyak dan masih dalam batas wajar sehingga masih bisa diatasi oleh bank.

Akibat hukum bagi debitur UMKM apabila restrukturisasi kredit gagal dilunasi adalah: Pertama, kredit yang sudah direstrukturisasi akan kembali statusnya menjadi kredit macet atau kredit bermasalah. Kedua, ketentuan mengenai hak dan kewajiban kreditur dan debitur dalam perjanjian restrukturisasi kredit juga diubah dengan pembaharuan perjanjian restrukturisasi kredit.

Kata Kunci: Perbankan, Kredit, Restrukturisasi kredit



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamin, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK AKIBAT PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI KREDIT PADA DEBITUR USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI BANK RAKYAT INDONESIA CABANG TUANKU TAMBUSAI PEKANBARU.”**

Kemudian shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dimana atas berkat perjuangan beliau lah akhirnya kita dapat merasakan kenikmatan yang tidak terhingga yakni iman dan Islam sebagaimana yang telah kita rasakan ini sampai akhir nantinya.

Demikian juga halnya yang penulis rasakan, akhirnya dengan izin dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat akhir untuk memperoleh gelas Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau program Strata Satu, dan semuanya tidak terlepas pula dari bantuan berbagai pihak, baik itu berbentuk moril maupun materil. Oleh sebab itu, dengan setulus hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda (Novanri Historika) dan Ibunda (Ramayani) tercinta serta Adikku tersayang (Muhammad Hafiz Januar) yang telah memberikan dukungan serta selalu memberikan semangat dan do'a dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menyelesaikan skripsi ini. Dan bekal ilmu pengetahuan serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara meteril maupun moril demi keberhasilan ananda dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Seluruh keluarga besar yang turut memberikan bantuan, saran dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Suyitno, M.Ag selaku Plt rektor dan Bapak. Drs. H. Suryan A. Jamrah, MA,. Dr. H. Kusnadi, M.Pd dan Drs. H. Promadi, MA., Ph.D selaku wakil rektor.
4. Yang terhormat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag serta Wakil Dekan I Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL dan wakil Dekan II Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag sekaligus Wakil Dekan III Dr. H. Magfirah, MA
5. Yang terhormat Bapak Firadaus, S.H, M.H selaku ketua jurusan Ilmu Hukum berserta Bapak Muslim, S.Ag., S.H., M. H selaku sekretaris jurusan Ilmu Hukum yang telah memberikan kemudahan dalam pelayanan yang berharga selama ini.
6. Yang terhormat Bapak Firadaus, S.H, M.H selaku pembimbing skripsi, terima kasih atas segala sikap yang penuh kesabaran, motivasi dan bantuannya yang tulus kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada Bapak Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA selaku Penasehat Akademik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

8. Segenap dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas dukungan dan bimbingannya selama penulis dalam perkuliahan.
9. Kepada perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku sebagai referensi bagi penulis.
10. Yang terhormat Bapak Chudori, SE beserta para staff BRI Tuanku Tambusai yang berkenaan memberikan izin untuk melakukan penelitian dan memberikan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku Besty Diana, Annisa Mayuni, Nurjannah, Nuraini Azzahra, Fairuz Musdalifa, Trias Yuliana, Febrima Dola, Rabiatul Adawiyah, Aprilia Dwi Dwidasmarani Putri dan para sahabat yang tidak bisa disampaikan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dorongan dalam penulisan skripsi ini.
12. Teman-teman angkatan 2017 khususnya Ilmu Hukum B dan Hukum Bisnis A yang telah memberikan masukan dan saran selama penulisan skripsi.
13. Serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberika bantuan dan dorongan dalam penulisan skripsi ini akhir kata terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Semoga kebaikan yang diberikan mendapat imbalan serta kemudahan dalam melakukan aktivitas hidup di dunia ini sekaligus pahala yang setimpal dari Allah



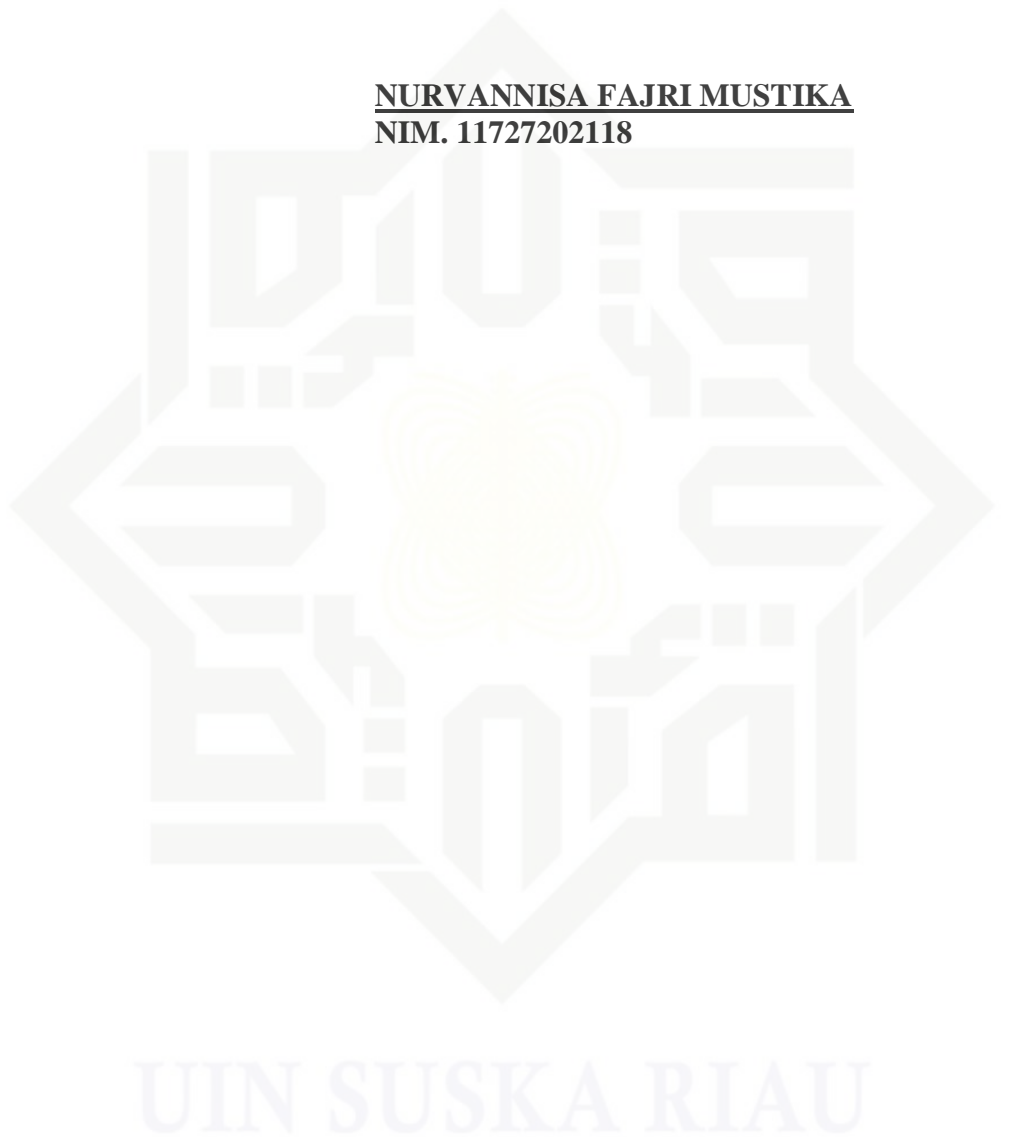
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SWT. Penulis sangat berharap mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya serta bagi pembaca pada umumnya.

Pekanbaru, Maret 2021
Penulis,

NURVANNISA FAJRI MUSTIKA
NIM. 11727202118





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penulisan	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	14
A. Sejarah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	14
B. Visi dan Misi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	15
C. Struktur Organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	17
BAB III KONSEP TEORITIS	21
A. Bank	21
B. Kredit	28
C. Restrukturisasi Kredit	32
D. Usaha Mikro Kecil dan Menengah	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit pada Debitur UMKM di BRI Cabang Tuanku Tambusai Pekanbaru	46
B. Akibat Hukum Bagi Debitur UMKM Apabila Restrukturisasi Tidak Berhasil	60



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Penelitian April sd Oktober 2020	9
Tabel 4.1	Tanggapan Debitur UMKM Tentang Pemberian Fasilitas Restrukturisasi Kredit	50
Tabel 4.2	Tanggapan Debitur UMKM yang Usahanya Dapat Dipulihkan Melalui Restrukturisasi Kredit	51
Tabel 4.3	Tanggapan Debitur yang Kesulitan Melunasi Kredit yang Sudah Direstrukturisasi	52
Tabel 4.4	Tanggapan Debitur UMKM yang Mendapatkan Restrukturisasi Kredit Kedua Kali	53
Tabel 4.5	Tanggapan Debitur UMKM Mengenai Akibat Hukum Yang Ditanggung Jika Restrukturisasi Kredit Gagal	61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT BRI Tbk	17
---	----





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian bank menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu, bank ialah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa dana bank tidak berasal dari dana yang dimiliki oleh bank itu sendiri, karena dana bank juga sangat terbatas, tetapi dari masyarakat dan simpanan jangka panjang pada bank tersebut. Untuk itu, bank berlomba-lomba menghimpun dana dari masyarakat untuk penyimpanan jangka panjang dalam jumlah besar agar bisa menjadi sumber dananya, dan dana tersebut akan mengalir kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit. Bank adalah lembaga yang melayani masyarakat di bidang keuangan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank memenuhi kebutuhan pembiayaan dan mempermudah mekanisme sistem pembayaran di semua sektor perekonomian.²

Penyaluran kredit kepada masyarakat adalah untuk mewujudkan fungsi bank sebagai penjaga stabilitas mata uang domestik. Fungsi lain dari bank adalah sebagai perantara keuangan yang diwujudkan dalam beberapa produk

¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

jasa guna memberikan kemudahan dana, jasa dan komoditas kepada masyarakat. Salah satu fungsi bank adalah mewujudkannya melalui pendirian Bank Rakyat Indonesia (selanjutnya disebut BRI) dalam rangka pemerataan pembangunan ekonomi masyarakat secara adil.³

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. BRI merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.⁴

Salah satu produk yang disediakan BRI untuk masyarakat adalah kredit. Menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 Angka 11 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁵

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22 / PBI / 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum mewajibkan bank untuk memberikan kredit kepada UMKM karena industrinya belum berkembang sepenuhnya. Padahal, UMKM memainkan peran strategis dalam pembangunan ekonomi negara. Bahkan di saat krisis pun, usaha kecil, menengah dan mikro memainkan peran penting dalam membantu memulihkan perekonomian negara. Hal ini dikarenakan

³ Santoso.R.T, *Kredit Usaha Perbankan*, (Yogyakarta: Andi, 1996), h. 3.

⁴ Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 tentang Bank Rakyat Indonesia.

⁵ Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

sektor UMKM lebih mudah dimasuki bagi para wirausahawan baru. Selain itu, UMKM memiliki dampak sosial bagi masyarakat. Ini termasuk mengurangi pengangguran dan mengatasi hilangnya pendapatan atau penghasilan masyarakat..⁶

Tentunya dalam memberikan kredit kepada calon debitur harus melalui beberapa tahapan, atau proses pengajuan kredit dan proses analisis kredit yang diajukan. Analisis yang digunakan oleh industri perbankan adalah analisis 5C yaitu *character* (karateristik), *capacity* (kapasitas), *capital* (permodalan), *condition* (kondisi ekonomi) dan *collateral* (jaminan). Prosedur ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari kesalahan dalam pemilihan dan alokasi dana, serta untuk menghindari risiko kredit di masa mendatang. Namun, tentu saja resiko kredit tidak dapat dihindari karena keterbatasan kemampuan manusia dalam memprediksi keadaan di masa depan, dalam hal ini adalah Covid-19.⁷

Dampak Covid-19 telah meningkatkan proporsi kesulitan ekonomi di masyarakat dan membuat gelisah pegiat UMKM. Menurut survei yang dilakukan oleh *International Labour Organization* (ILO) *Sustainable Competitiveness and Corporate Responsibility Program* (SCORE), 90% pelaku bisnis mengalami masalah ekonomi akibat pandemi Covid-19. Kemungkinan UMKM gagal melunasi kredit lebih besar dan meluas.

⁶ Supramono.G, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 153.

⁷ Nurasiah dan Mariani St.B Tanjung, *Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mitra Danagung Padang*, OSF Preprints, *Center for Open Science*, 2019, h. 2.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, pemerintah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (POJK Stimulus Dampak Covid-19) memberikan restrukturisasi kredit, baik yang mengakses perbankan maupun nonbank.

Sebelumnya hal ini sudah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Pasal 1 Angka 26 menyebutkan restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

Kebijakan ini berlaku untuk aspek penting bank yang menilai debitur yang terkena *Covid-19*. Bank terkait akan menentukan pedoman lebih lanjut. Walaupun pemerintah menerapkan kebijakan restrukturisasi, bank harus mewaspadai risiko kredit macet.⁸ Seperti yang terjadi di BRI Cabang Tuanku Tambusai Pekanbaru.

Restrukturisasi kredit dilaksanakan di BRI Cabang Tuanku Tambusai Pekanbaru BRI Cabang Tuanku Tambusai Pekanbaru pada awalnya melihat adanya prospek usaha yang baik bagi debitur UMKM, oleh karena itu pihak bank memberikan kesempatan yang bertujuan dalam rangka perbaikan kredit yaitu dengan melakukan restrukturisasi agar debitur UMKM dapat digolongkan kembali ke dalam kualitas kredit lancar yang sebelumnya bermasalah akibat *Covid-19*. Akan tetapi dalam pelaksanaan

⁸ Deftyana Ainnur Alif, *Restrukturisasi Kredit, Baik atau Buruk bagi Bank?*, 2020, <https://kumparan.com/deftyana-ainnur-alif/restrukturisasi-kredit-baik-atau-buruk-bagi-bank-1tg0UBHSPix/full>, diakses pada 16 Oktober 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

proses restrukturisasi tidak dapat berjalan lancar. Terdapat permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam melaksanakan restrukturisasi kredit macet.

Pada BRI Cabang Tuanku Tambusai Pekanbaru restrukturisasi kredit yang bermasalah dapat terjadi karena 2 faktor. Jika dilihat dari sisi bank hal ini dapat dianggap sebagai kegagalan restrukturisasi, misalnya pemilihan penyelamatan kredit yang kurang tepat. Sedangkan penyebab kegagalan dari sisi debitur UMKM adalah karena tidak sanggup lagi membayar cicilan bulanan akibat *Covid-19*, tidak lagi melakukan jual beli secara langsung dan tatap muka karena daya beli masyarakat turun, atau usaha yang tidak bisa dikembangkan lagi.

Restrukturisasi kredit bermasalah berarti debitur tidak sanggup untuk meluasi peminjamannya berupa angsuran pokok beserta bunga dan biaya lainnya yang akhirnya hal ini dapat merugikan pihak bank.⁹ Kerugian yang disebabkan karena tidak menerima dana yang dialokasikan dan pendapatan bunga yang tidak dapat diterima. Keadaan ini akan merusak kinerja likuiditas bank dan berdampak negatif yang akan menyebabkan bank membekukan usahanya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *Perlindungan Hukum Bagi Bank Akibat Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Pada Debitur Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Tuanku Tambusai Pekanbaru.*

⁹ *Ibid.*

B. Batasan Masalah

Agar penulis lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan restrukturisasi kredit dan akibat hukum yang timbul apabila pelaksanaan restrukturisasi kredit bermasalah tidak berhasil pada debitur UMKM di Bank Rakyat Indonesia Cabang Tuanku Tambusai Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan restrukturisasi kredit pada debitur UMKM di BRI Cabang Tuanku Tambusai Pekanbaru?
2. Apa akibat hukum yang timbul apabila pelaksanaan restrukturisasi kredit mengalami kegagalan pada debitur UMKM di BRI Cabang Tuanku Tambusai Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan restrukturisasi kredit pada debitur UMKM di BRI Cabang Tuanku Tambusai Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul apabila pelaksanaan restrukturisasi kredit mengalami kegagalan pada debitur UMKM di BRI Cabang Tuanku Tambusai Pekanbaru.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian harus diyakini kegunaannya bagi pemecahan masalah yang diteliti. Adapaun manfaat penelitian yang diharapkan adalah:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang perlindungan hukum bank, dan diharapkan dapat lebih menjadi referensi bagi para sarjana, penulis, dan orang-orang yang tertarik pada penelitian yang sama.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi BRI Cabang Tuanku Tambusai Pekanbaru, agar mengetahui permasalahan yang dihadapi ke depan dan dapat segera ambil tindakan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

c. Manfaat Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang pertama mempelajari data sekunder, kemudian dilanjutkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan mempelajari data primer di lapangan atau masyarakat..¹⁰ Dalam hal ini tentunya pihak-pihak yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi BRI Cabang Tuanku Tambusai Pekanbaru. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Artinya memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan restrukturisasi kredit serta akibat hukum yang timbul apabila pelaksanaan restrukturisasi kredit bermasalah tidak berhasil pada debitur UMKM di BRI Cabang Tuanku Tambusai Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Jalan Tuanku Tambusai No. 08-10, Pekanbaru sesuai dengan keberadaan dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Tuanku Tambusai Pekanbaru.. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian ini adalah pada bank tersebut merupakan bank yang paling banyak menerapkan restrukturisasi kredit kepada para debitur UMKM selama masa Covid-19 per November 2020. Hal ini berdasarkan riset yang dilakukan oleh Databoks, sebuah perusahaan riset dan media online yang bergerak di bidang statistik ekonomi dan bisnis. Menurut Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang mana hal itu dapat merugikan pihak bank apabila terdapat oknum debitur “nakal” yang memanfaatkan situasi tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di bank ini.

¹⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press:1986), h. 52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek atau subjek dengan ciri dan sifat tertentu, peneliti memutuskan untuk menelitinya dan kemudian menarik kesimpulan..¹¹ Pada penelitian kali ini populasinya adalah semua debitur UMKM yang diberlakukan restrukturisasi kredit dan debitur UMKM yang pelaksanaan restrukturisasi kreditnya bermasalah pada BRI Cabang Tuanku Tambusai Pekanbaru

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari karakteristik populasi yang digunakan untuk penelitian. Jika populasinya besar, maka peneliti mungkin tidak cocok untuk menggunakan semuanya, maka peneliti akan mengambil sampel dari populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar mewakili populasi dan harus valid. Namun dalam penelitian kualitatif ukuran sampel tidaklah penting, karena yang penting adalah banyaknya informasi dalam sampel tersebut.¹²

Tabel 1.2
Data Penelitian April sd Oktober 2020

No.	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Marketing KPR	5	1	20%
2.	Debitur UMKM yang restrukturisasi kreditnya bermasalah	3993	83	2,10%

Sumber: Data Olahan 2020

¹¹ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2014), h. 65.

¹² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Hukum Primer, yaitu data yang diperoleh di lapangan tempat lokasi penelitian,¹³ dalam hal ini penulis memperoleh data dari pihak-pihak yang berhubungan dengan perlindungan hukum yang dapat diupayakan bank terhadap pelaksanaan restrukturisasi kredit bagi para debitur.
- b. Data hukum sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka yang meliputi perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Data Hukum Tersier, mengacu pada bahan hukum yang melengkapi kedua bahan hukum di atas, seperti kamus dan ensiklopedia yang terkait dengan subjek penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati.¹⁴ Dalam hal ini penulis akan melakukan observasi langsung di tempat untuk mendapatkan gambaran nyata dari topik penelitian dan objek penelitian yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian.
- b. Angket (kuesioner), adalah teknik pengumpulan data yang memberikan responden serangkaian pertanyaan tertulis untuk dijawab,

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 30.

¹⁴ Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui pos atau internet.¹⁵

- c. Wawancara, yaitu mengumpulkan informasi melalui metode tanya jawab untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang pertanyaan atau topik yang diangkat dalam penelitian.¹⁶
- d. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan mempelajari meliputi perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.¹⁷

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif di mana pernyataan tertulis atau lisan dari narasumber dicatat berdasarkan fakta di lapangan. Langkah selanjutnya adalah diagram deduktif dari kesimpulan, yaitu penjelasan rinci tentang perlindungan hukum bank atas restrukturisasi kredit bank pada BRI cabang Tuanku Tambusai Pekanbaru, dan analisis datanya, kemudian ditarik kesimpulan dari hal-hal umum hingga masalah khusus.¹⁸

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan dengan membaginya ke dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Jakarta: Alfabeta, 2008), h. 142.

¹⁶ V. Wiratna Sujarweni, *Op. cit.*, h. 31.

¹⁷ Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011), h. 53.

¹⁸ Soejono Soekanto, *loc.cit.* h. 252.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan gambaran umum tentang sejarah berdirinya BRI Cabang Tuanku Tambusai Pekanbaru, struktur organisasi BRI Cabang Tuanku Tambusai Pekanbaru, serta visi dan misi BRI Cabang Tuanku Tambusai Pekanbaru.

BAB III : KONSEP TEORITIS

Pada bab ini menguraikan tentang pengertian bank, asas, fungsi dan tujuan bank, jenis-jenis bank, macam kegiatan bank, pengertian kredit, jenis-jenis kredit, penggolongan kredit, penanganan kredit bermasalah, pengertian restrukturisasi kredit, bentuk-bentuk restrukturisasi kredit, penanganan restrukturisasi kredit bermasalah, serta pengertian UMKM, klasifikasi UMKM, karakteristik UMKM dan kekuatan dan kelemahan UMKM.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang pelaksanaan restrukturisasi kredit dan akibat hukum yang timbul apabila pelaksanaan restrukturisasi kredit bermasalah tidak berhasil pada debitur UMKM di BRI Cabang Tuanku Tambusai Pekanbaru.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Bank Rakyat Indonesia atau yang biasanya disingkat BRI adalah salah satu bank milik negara tertua di Indonesia. BRI pertama kali didirikan oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dan kawan-kawannya di Purwokerto, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 16 Desember 1895. Awalnya, nama bank ini adalah *De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden* yaitu Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto.

Pada masa setelah Indonesia merdeka, berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Januari 1946, menetapkan bahwa prakarsa BRI merupakan bank pemerintah pertama di Republik Indonesia. Selama perang untuk mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, aktivitas BRI dihentikan untuk jangka waktu tertentu, dan tidak dimulai kembali hingga Perjanjian *Renville* berganti nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat (BRIS) pada tahun 1949.

Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) didirikan pada tahun 1960 melalui PERPU nomor 41 yang merupakan penggabungan BRI, Bank Tani Nelayan dan *Nederlandsche Maatschappij* (NHM). Kemudian, sesuai Keputusan Presiden (Penpres) tanggal 9 September 1965, BKTN dilebur menjadi Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Tani dan Koperasi Nelayan. Setelah sebulan beroperasi, dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal bernama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Bank Nasional Indonesia. dalam peraturan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II, bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Undang-Undang Pokok Perbankan dan Undang-undang No 13 Tahun 1968 tentang Undang-Undang Bank Sentral mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Unit II bidang Rural dan Ekspor Impor dipisah menjadi bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Tugas-tugas pokok Bank Rakyat Indonesia adalah sebagai Bank Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968.

Sejak 1 Agustus 1992, status BRI diubah menjadi perseroan terbatas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Undang-Undang Perbankan tanggal 21 tahun 1992. Saat itu, kepemilikan BRI masih di tangan pemerintah Republik Indonesia yaitu 100%. Pada tahun 2003, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank tersebut, menjadikannya perusahaan terbuka yang secara resmi bernama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang masih digunakan sampai sekarang.¹⁹

B. Visi dan Misi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

- a. Visi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Menjadi *The Most Valuable* Bank di Asia Tenggara dan *Home to the Best Talent*.

¹⁹ Sejarah BRI, <https://bri.co.id/info-perusahaan>, diakses pada 23 Maret 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Misi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

1. Memberikan Yang Terbaik.

Dengan mengutamakan pelayanan kepada sektor mikro, kecil, dan menengah untuk mendukung perkembangan ekonomi masyarakat, maka bisnis perbankan yang terbaik dapat dijalankan.

2. Menyediakan Pelayanan Yang Prima.

Melalui penggunaan prinsip-prinsip operasional dan kemampuan manajemen risiko yang sangat baik, sumber daya manusia yang profesional dan budaya berbasis kinerja, teknologi informasi yang andal dan tersedia, serta jaringan konvensional dan digital yang bermanfaat, kami memberikan layanan berkualitas tinggi kepada nasabah.

3. Bekerja dengan Optimal dan Baik.

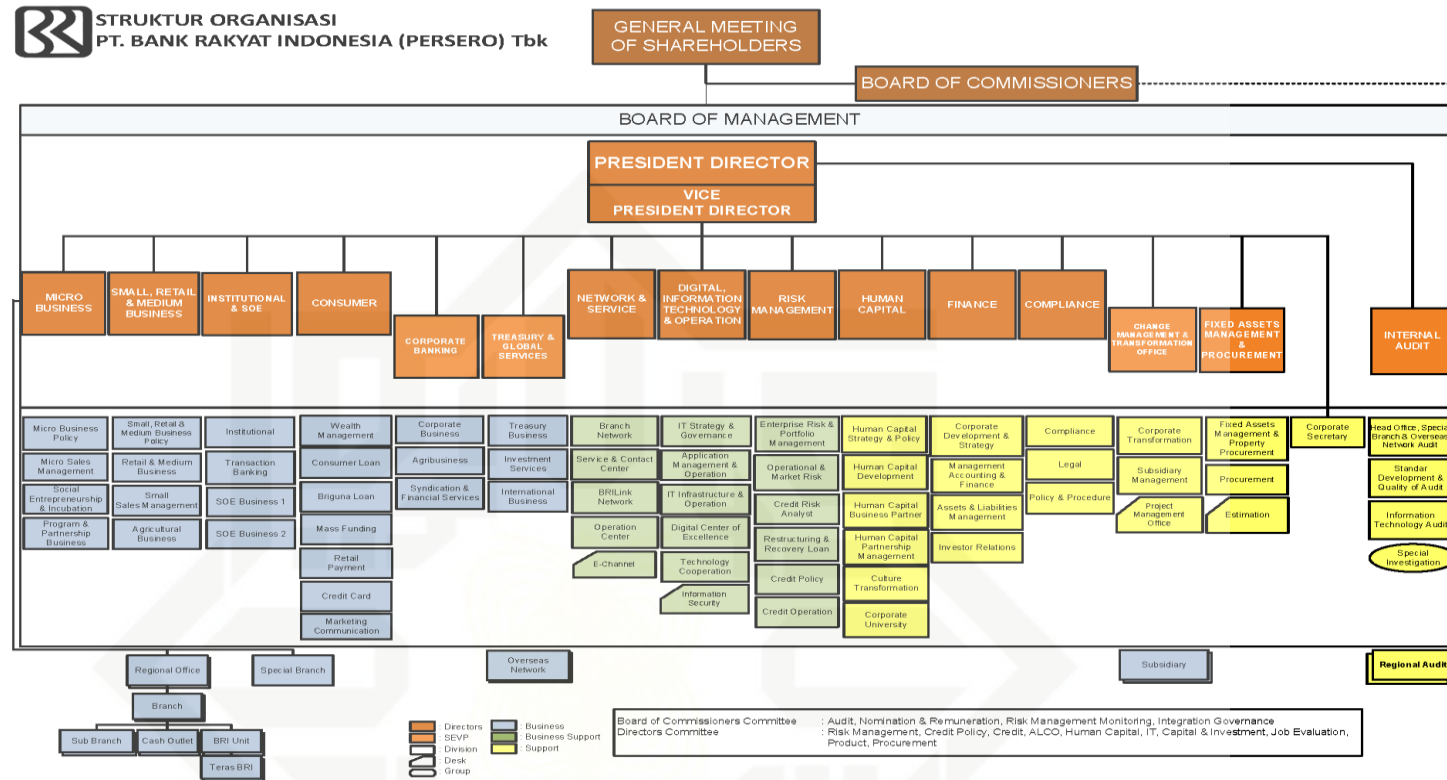
Dengan mematuhi prinsip pembiayaan berkelanjutan dan praktik tata kelola perusahaan yang baik, kami akan memberikan kepentingan terbaik bagi pihak yang berkepentingan.²⁰

²⁰ *Ibid.*



C. Struktur Organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Gambar 2.2
Struktur Organisasi PT BRI Tbk



Struktur organisasi merupakan susunan dan hubungan antara berbagai bagian dan jabatan dalam kegiatan bisnis suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi dimaksudkan agar proses kerja sama antar pimpinan dan bawahannya dapat terjalin dengan baik. Dalam struktur organisasi yang baik, hubungan kewenangan siapa melapor kepada siapa harus dijelaskan.²¹

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dipimpin oleh seorang direktur utama yang bertanggung jawab untuk mengelola operasional perusahaan dan karyawannya sesuai dengan keseluruhan kebijakan yang digariskan oleh pemerintah. Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam struktur organisasi ini adalah sebagai berikut.

a. Pimpinan Cabang

Tugas utama pimpinan cabang adalah bertanggung jawab langsung kepada Direksi dan Kepala Divisi Kantor Pusat. Selain itu tugas pimpinan cabang meliputi pelaksanaan pengembangan usaha, kegiatan operasional, pengembangan sumber daya manusia dan mengawasi target dan pencapaian yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Pimpinan cabang membawahi: Manajer Kredit dan Pemasaran, Manajer Operasi, dan Kepala Cabang Pembantu.

b. Manajer Kredit dan Pemasaran

Bertanggung jawab untuk membantu merumuskan serta melaksanakan kebijakan kredit (terkhusus bagian kustomer dan retail) agar proses

²¹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkreditan yang sehat dapat tercapai dan meminimalisir penggalangan dana dari pihak ketiga. Manajer Kredit dan Pemasaran membawahi: *Account Officer* Korporasi, *Account Officer* Kredit, Kepala *Service Assistant* Kredit dan Pemasaran, Kepala Unit Kredit, dan *Staff Funding*.

c. Manajer Operasional

Tanggung jawab Manajer Operasional yaitu mengarahkan, membina, serta mengawasi seluruh kegiatan transaksi sehari-hari agar kegiatan bidang operasional dapat berjalan sesuai ketentuan yang telah ditentukan. Manajer Operasional membawahi Unit Operasional, Unit Administrasi Kredit, Unit Internal Control.

d. Audit dan Internal Control

Tugasnya adalah untuk bertanggung jawab mengawasi seluruh kegiatan transaksi dan kegiatan bank agar tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Audit dan Internal Control membawahi: Audit Intern, Staff Audit, Audit Komersial, Bidang Pemeriksaan Non Kredit, Investigasi Kredit, *Loan Review*, Unit Administrasi Kredit.

e. Unit Akuntansi dan Pelaporan

Mengelola kepastian dan kebenaran segala proses pembuatan laporan keuangan untuk kemudian diadministrasikan dan menangani pekerjaan yang berkaitan dengan teknologi (*hardware* dan *software*).

f. Unit SDM dan Umum

Tugasnya adalah untuk bertanggung jawab kepada kepastian dan kebenaran serta pengadministrasian kepegawaian dan melakukan kegiatan kesekretariatan.²²

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²² *Ibid.*

A. Bank

1. Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau bentuk lain untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Menurut kamus istilah hukum Fockema Andraea, bank adalah lembaga yang menjalankan perusahaan dan bertanggung jawab untuk mengumpulkan uang dari pihak ketiga atau memperoleh uang dari pihak ketiga. Karena ada bank yang hanya bisa memberikan cek kepada bankir yang berkepentingan, dalam arti luas bank adalah perseorangan atau lembaga yang secara rutin memberikan dana kepada pihak ketiga dalam pekerjaannya.²³

Menurut Hermansyah bank Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada

²³ Zainil Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 25.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam usaha pembayaran.²⁴

Sedangkan pengertian perbankan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa bank adalah suatu badan usaha yang menjalankan kegiatan-kegiatan perbankan seperti menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk-bentuk tertentu guna meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.

2. Asas, Fungsi dan Tujuan Bank

Asas, fungsi serta tujuan bank dinyatakan dalam Pasal 2, 3 dan 4 di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu sebagai berikut.

a. Asas

Perbankan Dalam menjalankan usahanya, industri perbankan Indonesia dilandasi oleh prinsip kehati-hatian dan demokrasi ekonomi. Yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan asas kehati-hatian adalah asas yang harus dipatuhi dan dilaksanakan

²⁴ Hermansyah, *op.cit.h.8*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan sungguh-sungguh, menyeluruh, dan profesional oleh semua pihak..²⁵

b. Fungsi

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah menghimpun dan membimbing dana masyarakat. Bank menghimpun kelebihan dana (*surplus of funds*) dari masyarakat dan mengarahkannya kepada pihak yang membutuhkan (*lacks of funds*).²⁶ Sebagai saluran penghimpunan dana dari dan dari masyarakat, bank harus lebih aktif menghimpun dana dari masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan nasional guna meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²⁷

c. Tujuan

Industri perbankan Indonesia bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

3. Jenis-jenis Bank

a) Bank dari Segi Usahanya

1. Bank Umum. Menurut Pasal 1 ayat 3 UU Perbankan, bank umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip

²⁵ Ruth Febrianti Hutapea, *Upaya Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Ditinjau Dari Asas-Asas Hukum Perjanjian Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Surakarta*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011, h. 14.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Zainal Asikin, *op.cit.*, h. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konvensional dan / atau Syariah, serta menyediakan jasa pembayaran dalam kegiatannya.

2. Bank Perkreditan Rakyat menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Perbankan adalah bank yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan atau menurut hukum Ssyariah dan tidak menyediakan jasa pembayaran. lintas pembayaran.

b) Bank dari Segi Kepemilikan

1. Bank Milik Negara adalah bank milik negara yang modalnya berasal dari pemerintah pusat atau daerah. Karena merupakan badan usaha milik negara, maka Bank Nasional harus berbentuk Perum, PT Persero atau BUMD.
2. Bank Swasta adalah bank yang dimiliki oleh badan usaha milik negara dan swasta asing. Bank Swasta Nasional adalah bank yang dimiliki oleh badan hukum atau perseorangan Indonesia. Sedangkan bank swasta asing adalah bank yang dimiliki oleh badan hukum asing atau perseorangan, biasanya berbentuk cabang.

c) Bank dari Segi Operasional

1. Bank Devisa adalah bank yang telah memperoleh izin perbankan valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Bank devisa dapat melakukan kegiatan transfer ke luar negeri, jual beli valas, transaksi impor dan ekspor, dan layanan valuta asing lainnya.
2. Bank Non Devisa merupakan bank yang dapat menjalankan usaha perbankan valuta asing tanpa memiliki izin Bank Indonesia. Oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena itu, usaha bank non devisa adalah melakukan transaksi yang masih dalam batas negara.²⁸

4. Macam Kegiatan Bank

Sebagai lembaga keuangan yang berorientasi bisnis, berbagai aktivitas yang dilakukan bank tidak terlepas dari industri keuangan. Bisnis perbankan yang paling penting adalah membeli dana dengan mengumpulkan dana dari masyarakat, dan kemudian mengembalikannya ke masyarakat melalui pemberi pinjaman atau kredit untuk dijual.

Di dalam Pasal 6 Undang-Undang Perbankan, kegiatan yang dilakukan Bank Umum meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

²⁸ Ruth Febrianti Hutapea, *op.cit.*, h. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - 5) Obligasi;
 - 6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - 7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
 - g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
 - h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 - j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
 - k. membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
 - l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- m. menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;
- n. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁹

Selain kegiatan yang telah disebutkan di atas, Bank Umum dapat pula melakukan kegiatanlain seperti yang tertuang dalam pasal 7 Undang-Undang Perbankan:

- a. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.³⁰

²⁹ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

³⁰ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

B. Kredit

1. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Italia "*credere*" yang artinya kepercayaan (*trust*). Penyaluran dana didasarkan pada kepercayaan kreditur kepada debitur, yaitu debitur akan mengembalikan pinjaman dan bunganya sesuai kesepakatan kedua belah pihak.³¹

Menurut Undang-Undang Perbankan Pasal 1 Angka 12 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.³²

Menurut Zainal Asikin Kredit bank adalah pemberian kredit dalam bentuk rupiah atau valuta asing kepada pihak ketiga bukan bank (termasuk pegawai bank itu sendiri), serta pembelian surat berharga dan perjanjian jual beli / akseptasi tagihan yang timbul dari anjak piutang dan cerukan.

Pemberian kredit merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan oleh bank untuk mengolah modal dan simpanan nasabah agar dapat menggunakan bunga yang dibayarkan debitur berupa bunga untuk memberikan pinjaman kepada nasabah lain.

³¹ Malayu S.P Hasibun, *Dasar-Dasar Perbankan* , (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h.

³² Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jenis-jenis Kredit

Berdasarkan jangka waktu dan penggunaannya kredit digolongkan menjadi 3 jenis:

- a. Kredit Modal Kerja, yaitu pinjaman yang diberikan dalam mata uang rupiah atau mata uang asing, digunakan untuk mendanai operasional perusahaan sehari-hari dalam jangka pendek, dan dapat diberikan sesuai kesepakatan kedua belah pihak atau pihak terkait. Ada beberapa jenis Kredit Modal Kerja ini antara lain Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), KUPEDES, Kredit Perkebunan Swasta Nasional (PSN), Kredit Ekspor, dan Kredit Koperasi.³³
- b. Kredit Investasi, yaitu kredit jangka menengah hingga jangka panjang yang dirancang untuk membeli barang modal dan jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi, perluasan, proyek keimigrasian, dan / atau proyek baru.³⁴
- c. Kredit Konsumsi, mengacu pada kredit yang diberikan kepada individu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari individu dan keluarga. Sumber pengembalian kredit ditentukan berdasarkan pendapatan profesi yang bersangkutan.

3. Penggolongan Kredit

Penggolongan kredit telah ditentukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum sebagai berikut. Kredit lancar, kredit dalam

³³ Zainal Asikin, *op.cit.*, h. 188.

³⁴ Hermansyah, *op.cit.*, h. 60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet.³⁵

- a. Kredit lancar yaitu jika memenuhi ketentuan berikut: angsuran pinjaman dan / atau bunga yang benar, perubahan rekening aktif atau sebagian kredit dijamin dengan agunan tunai.
- b. Kredit dalam perhatian khusus yaitu artinya, jika kondisi berikut ini dipenuhi: tunggakan pokok dan / atau bunga tidak melebihi 90 hari, terkadang terjadi cerukan, perubahan rekening relatif rendah, dan terdapat sedikit pelanggaran terhadap persetujuan atau dapatkan kontrak untuk mendukung pinjaman baru baru.
- c. Kredit kurang lancar yaitu terpenuhi persyaratan sebagai berikut: tunggakan pokok dan / atau bunga lebih dari 90 hari, sering terjadi cerukan, frekuensi perubahan rekening yang relatif rendah, pelanggaran komitmen kontraktual lebih dari 90 hari, tanda-tanda masalah keuangan atau kredit macet yang dihadapi dokumen Pinjaman debitur.
- d. Kredit yang diragukan yaitu terdapat situasi dimana pokok pinjaman tertunggak lebih dari 180 hari, sering terjadi cerukan bersifat permanen, waktu gagal bayar melebihi 180 hari, terjadi kapitalisasi bunga, atau kurangnya dokumen hukum yang dapat diandalkan dalam perjanjian kredit dan agunan telah meningkat jumlahnya.
- e. Kredit macet yaitu jika kondisi berikut ini dipenuhi: tunggakan pokok dan / atau bunga lebih dari 270 hari, kerugian operasional ditanggung

³⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh pinjaman baru, atau dari sudut pandang hukum atau kondisi pasar, jaminan tidak dapat dibayarkan dengan nilai wajar.

4. Penanganan Kredit Bermasalah

Kategori kredit bermasalah adalah kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit bermasalah. Ada dua cara untuk menangani kredit macet, yaitu bantuan kredit dan likuidasi kredit. Bantuan kredit merupakan langkah penyelesaian kredit macet melalui negosiasi antara bank dan debitur. Sedangkan penyelesaian kredit merupakan prosedur penyelesaian kredit yang dilakukan oleh lembaga hukum.³⁶

Di dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP menjadi pedoman dalam melakukan penyelamatan kredit yaitu dengan cara:

- a. *Rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu upaya hukum untuk mengubah syarat-syarat perjanjian kredit terkait jadwal pelunasan / masa kredit termasuk masa tenggang dan termasuk perubahan jumlah pinjaman. Jika perlu, jalur kredit tambahan pun dapat diberikan.
- b. *Reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu suatu upaya untuk menghemat pekerjaan kredit dengan mengubah sebagian atau seluruh persyaratan dalam perjanjian kredit, Persyaratan ini tidak terbatas pada perubahan jadwal angsuran dan / atau jangka waktu kredit. Namun, batas kredit akan diubah, dan tidak ada batas kredit tambahan yang akan diberikan, dan sebagian atau seluruh batas kredit tidak akan diubah menjadi ekuitas perusahaan.

³⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. *Restructuring* (penataan kembali yaitu pekerjaan simpan kredit dengan mengubah syarat-syarat perjanjian kredit (berupa pemberian kredit lain) atau dengan mengubah seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan atau *rescheduling* atau *reconditioning* menjadi simpan kredit.

Sementara itu, penyelesaian masalah kredit macet merupakan langkah terakhir yang harus ditempuh para pihak melalui lembaga hukum, seperti Komisi Urusan Piutang Nasional (PUPN), Badan Penyelenggara Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), lembaga peradilan. dan institusi lainnya. Alternatif penyelesaian sengketa (APS).

C. Restrukturisasi Kredit

1. Pengertian Restrukturisasi Kredit

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset bank Umum Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

Di dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP Restrukturisasi kredit adalah suatu upaya penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan syarat-syarat yang ada di dalam perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* atau *reconditioning*. Tujuan restrukturisasi adalah (1) menghindarkan bank dari kerugian, karena bank harus menjaga kualitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kredit yang diberikan, (2) membantu meringankan hutang debitur sehingga debitur dapat menggunakan keringanan ini untuk memulihkan kredit. hutang dan usahanya serta memulihkan usaha yang mana sebagian dari pendapatan dapat digunakan untuk melunasi hutang dan sebagian dari kegiatan usahanya, (3) dengan restrukturisasi maka dapat menghindari penyelesaian kredit melalui lembaga hukum, karena dalam prakteknya penyelesaian melalui lembaga hukum membutuhkan biaya yang tidak sedikit, tenaga, waktu dan tenaga, hasilnya lebih rendah dari piutang.³⁷

2. Bentuk-bentuk Restrukturisasi Kredit

- a. Penurunan Suku Bunga Kredit. Metode ini dirancang untuk menurunkan suku bunga kredit debitur sehingga suku bunga kredit yang dibayarkannya lebih rendah dari suku bunga yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, debitur dapat membayar bunga yang lebih rendah dan lebih rendah setiap bulan, sehingga pendapatan yang diterima debitur dapat dialokasikan untuk pokok hutang dan usaha, sehingga keuntungan yang diterima dapat digunakan untuk membayar kembali hutang tersebut.
- b. Pengurangan Tunggalan Bunga Kredit. Debitur dibebaskan dari kewajiban membayar sebagian atau seluruh bunga kredit. Dengan cara ini diharapkan debitur dapat mengembangkan usahanya sendiri sehingga keuntungan yang diperoleh dapat dilunasi untuk melunasi hutang pokoknya.

³⁷ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 266.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pengurangan Tunggal Pokok Kredit. Mengurangi tunggakan pokok merupakan upaya terbaik yang diberikan bank kepada debitur, karena pengurangan tunggakan pokok biasanya disertai dengan kompensasi bunga dan denda penuh. Penurunan pokok ini merupakan pengorbanan yang besar bagi bank, karena aset bank berupa pokok utang tidak akan dikembalikan, tetapi bank yang menanggung kerugian.³⁸
- d. Perpanjangan Jangka Waktu Kredit. Bentuk restrukturisasi kredit yang melunasi hutang debitur, dilakukan melalui penambahan jangka waktu. Dengan memperpanjang jangka waktu kredit, kualitas kredit debitur digolongkan sebagai kredit macet.
- e. Penambahan Fasilitas Kredit. Debitur yang memberikan fasilitas kredit tambahan diharapkan dapat mengembangkan usahanya kembali, sehingga memperoleh keuntungan yang nantinya akan digunakan untuk membayar kembali pinjaman lama dan pinjaman baru.
- f. Pengambil Alihan Agunan/ Aset Debitur. Bank mengambil alih agunan / aset debitur yang nilainya sama dengan utang yang dimiliki debitur. Dengan kata lain, jaminan kredit yang diambil alih oleh Bank Dunia adalah untuk membayar hutang debitur.
- g. Jaminan Kredit Dibeli oleh Bank. Jaminan kredit debitur dapat dibeli oleh bank melalui lelang. UU Perbankan mengatur bahwa jika debitur gagal memenuhi kewajibannya kepada bank, kreditor dapat membeli agunan seluruhnya atau sebagian dari debitur melalui lelang agunan, dengan syarat agunan yang dibeli harus dibayar secepatnya.

³⁸ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Konversi Kredit Menjadi Modal Sementara dan Pemilikan Saham. Artinya bank mengubah kredit menjadi saham perusahaan milik debitur. Bank memiliki saham di perusahaan debitur untuk melunasi hutang debitur. Namun, penyertaan modal perusahaan debitur hanya lima tahun atau ketika perusahaan debitur memperoleh keuntungan. Jika jangka waktu melebihi lima tahun dan perusahaan debitur tidak memperoleh keuntungan, bank wajib mengimbangi penyertaan modal.
- i. Alih manajemen. Pekerjaan suatu proyek perusahaan debitur didanai melalui kredit bank. Proyek tersebut dapat menghasilkan dana, tetapi manajemen tidak dapat memenuhi kewajibannya. Bank Dunia dapat mengganti manajemennya dengan menunjuk manajemen baru yang dapat mengelola perusahaan debitur.
- j. Pengambil Alihan Pengelolaan Proyek. Umumnya, debitur tidak dapat mengelola proyek yang didanai dengan kredit, juga tidak dapat menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk membayar kembali kredit. Untuk menghemat kredit, kreditur pemegang hak tanggungan proyek dapat mengambil alih pengelolaan proyek dengan ketentuan sebagai berikut: Akta Hak Tanggungan (APHT) memuat komitmen debitur (sebagai pemberi hak tanggung jawab) untuk debitur untuk mengelola hipotek sesuai dengan putusan pengadilan setempat. Hak objek hak (proyek pinjaman hipotek), yurisdiksi putusan termasuk lokasi proyek.³⁹

³⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Novasi (Pembaharuan Hutang). Novasi dilakukan dengan cara mengalihkan debitur lama ke debitur baru beserta agunannya (update subyektif pasif), mengalihkan debitur lama ke debitur baru (update subyektif aktif), dan mengubah isi atau objek perjanjian tanpa mengubah posisi kreditor lama dan baru.⁴⁰
- l. Subrogasi. Subrogasi adalah penggantian kewajiban debitur untuk melunasi hutangnya kepada pihak ketiga, yang melunasi hutangnya kepada kreditor. Oleh karena itu, perjanjian hutang antara debitur dan kreditor lama dihapus, tetapi perjanjian hutang baru muncul antara debitur dan kreditor baru. Pinjaman baru memiliki hak untuk menagih piutang debitur.
- m. *Cessie*. *Cessie* adalah hak untuk mengalihkan hak atas benda bergerak tidak berwujud (intangible goods) biasanya dalam bentuk piutang atas nama pihak ketiga. Penyelamatan kredit dengan cara ini merupakan inisiatif dan inisiatif kreditor. Oleh karena itu, kreditor harus mencari kredit lain yang mereka inginkan dan segera melakukan pembayaran penuh untuk membeli piutang. Periksa apakah nilai agunan harus lebih besar dari piutang yang akan dijual. Jaminan yang dapat dipasarkan, jaminan hipotek strategis yang mengikat secara hukum dan dokumen yang lengkap.⁴¹
- n. Penjualan Barang Jaminan oleh Debitur. Bentuk restrukturisasi kredit ini sebenarnya dapat menghemat waktu dan tenaga, dan lebih baik

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daripada lelang. Dalam hal ini, Bank Dunia sebagai kreditur dapat ikut serta dalam penjualan agunan debitur, seperti bernegosiasi dengan calon pembeli, menyesuaikan harga jual agar tidak terlalu rendah atau terlalu tinggi, dan mengarahkan hasil penjualan agar bisa langsung menyetorkan Bank untuk melunasi hutang debitur.

- o. Bank Menjual Barang-barang Jaminan Di Bawah Tangan Berdasarkan Surat Kuasa. Debitur memberikan otorisasi *letter of credit* untuk menjual barang yang dijamin untuk hutangnya melalui surat kuasa. Oleh karena itu, dengan surat kuasa, kuasa untuk menjual jaminan debitur menjadi milik kuasa, dan milik kreditur. Hasil penjualan kemudian dapat digunakan untuk membayar hutang debitur.
- p. Penghapusan piutang. Penghapusan piutang adalah pelepasan hutang debitur secara keseluruhan atau sebagian atau karena jatuh tempo secara hukum hutang tersebut. Penghapusan piutang menurut KUHPdata diatur pada: a. Pasal 1967: Pasal ini mengandung pengertian bahwa Bank melakukan penghapusan hutang Debitur baik seluruhnya atau sebagian setelah lewat waktu 30 tahun dan selama waktu tersebut Bank tidak pernah melakukan penagihan sejak tanggal perjanjian kredit. b. Pasal 1381: Pasal ini mengandung pengertian bahwa penghapusan piutang terjadi karena pembebasan hutang oleh Bank sebagai Kreditur (*Kwijtschelding*). Pembebasan ini terjadi karena Bank memberikan potongan (*diskont*).⁴²
- q. Cegah Tangkal Debitur Macet

⁴² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika pemilik perusahaan dan direktur atau direktur perusahaan sering menyalahgunakan keuangan perusahaan untuk keuntungan pribadi, dan orang tersebut sering bepergian ke luar negeri dan mengakibatkan pinjaman macet, maka kantor imigrasi dapat mengajukan permintaan untuk melengkapi kredit tersebut. Kantor imigrasi mencari bantuan untuk mencegah manajemen atau pemilik menyalahgunakan perusahaan keuangan untuk menghindari pergi ke luar negeri.⁴³

3. Penanganan Restrukturisasi Kredit Bermasalah

Jika penyelamatan kredit macet atau kredit bermasalah melalui restrukturisasi ini gagal, dan nasabah masih keras kepala, bank dapat mengambil langkah terakhir, yaitu menyelesaikan dengan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA).

Namun segala bentuk restrukturisasi kredit pasti akan memiliki kekurangan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Biasanya kendala yang dihadapi adalah kebutuhan biaya seperti pajak penjualan, biaya akta, dan pemindahan nama sertifikat agunan berupa tanah dan bangunan. Biaya pajak untuk jual beli tanah cukup besar, jadi siapa yang harus membayarnya.

Setelah agunan menjadi milik bank, yaitu setelah menjadi aset bank, maka penjualan aset tersebut sesuai anggaran dasar perseroan biasanya memerlukan persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS) yang memakan waktu sejumlah waktu karena RUPS tidak diadakan setiap

⁴³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saat. Pada saat yang sama, "UU Perbankan" mensyaratkan penjualan segera agunan yang telah ditebus dalam waktu yang terlalu singkat karena sulit untuk menjual kembali agunan seperti tanah dan bangunan.⁴⁴

Sebelum kreditur mengambil alih agunan debitur, langkah pertama yang bisa dilakukan adalah memberi tahu debitur tentang tunggakan pembayaran dan memberikan surat peringatan. Langkah terakhir yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan somasi melalui Pengadilan Negeri.

D. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sudah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Pasal 1 Angka 3, 4 dan 5.

Usaha Mikro adalah usaha produksi yang dimiliki oleh perseorangan dan / atau badan usaha perseorangan yang memenuhi standar usaha mikro yang diatur dalam undang-undang ini.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif mandiri, dilaksanakan oleh individu atau badan usaha, bukan anak perusahaan atau cabang yang secara langsung atau tidak langsung dimiliki, dikendalikan, atau dimiliki oleh media atau perusahaan, bukan oleh anak perusahaan atau cabang dari perusahaan yang mematuhi ini Perusahaan besar yang diwajibkan oleh hukum untuk standar bisnis kecil.

⁴⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif mandiri, dilaksanakan oleh orang perseorangan atau badan usaha, badan usaha atau badan usaha yang tidak dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh perusahaan kecil, total aset atau total pendapatan penjualan tahunan anak atau cabang yang dikuasainya atau milik sesuai dengan Peraturan hukum ini untuk perusahaan besar.

Kriteria UMKM juga sudah terdefiniskan di dalam undang-undang ini yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan temoat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp 50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp 300.000.000,00.
- b. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp 50. 000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 500. 000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300. 000.000,00 juta hingga maksimum Rp.2.500.000,00.
- c. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp 500. 000.000,00 hingga paling banyak Rp 100.000.000.000,00 hasil penjualan tahunan diatas Rp.2.500.000.000,00 sampai paling tinggi Rp 50.000.000.000,00.⁴⁵

⁴⁵ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UMKM adalah unit usaha produktif yang mandiri, dijalankan oleh perseorangan atau badan usaha di berbagai sektor perekonomian. Pada prinsipnya, perbedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), serta Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan ketiga alat ukur tersebut berbeda-beda di setiap negara. Oleh karena itu, memang sulit membandingkan kepentingan atau peran usaha kecil dan mikro antar negara.⁴⁶

2. Klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Dari segi pembangunan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha dengan jumlah terbesar, selain itu kelompok ini terbukti mampu bertahan dari berbagai dampak krisis ekonomi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan kelompok usaha mikro, kecil dan menengah yang melibatkan banyak kelompok. Berikut ini adalah klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):

- a) *Livelihood Activities*, merupakan UMKM yang digunakan sebagai sarana mencari nafkah biasanya disebut sebagai sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima.
- b) *Micro Enterprise*, UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum bisa memulai usahanya sendiri.

⁴⁶ Tulus. T.H. Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2012), h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- d) *Fast Moving Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan bertransformasi menjadi usaha besar (UB).⁴⁷

3. Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Mengenai karakteristik UMKM sudah dijabarkan Pandji Anoraga dalam bukunya *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro* sebagai berikut.⁴⁸

- a. Sistem pembukuan relatif sederhana dan seringkali tidak mengikuti prinsip manajemen akuntansi standar. Terkadang, pembukuannya tidak up-to-date, sehingga sulit untuk menilai kinerja perusahaan.
- b. Mengingat persaingan yang ketat, margin laba operasi seringkali sangat rendah.
- c. Modal terbatas.
- d. Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan perusahaan masih sangat terbatas.
- e. Skala ekonomi terlalu kecil, sehingga sulit mengharapkan pengurangan biaya untuk mencapai efisiensi jangka panjang.
- f. Fungsi pemasaran dan negosiasi serta verifikasi pasar sangat terbatas.
- g. Mengingat keterbatasan sistem administrasi, kemampuan menghimpun dana dari pasar modal sangat rendah. Untuk memperoleh dana di pasar

⁴⁷ Ade Resalawati, *Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UKM Indonesia*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011, h. 31.

⁴⁸ Panji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro Dan Mikro*, (Yogyakarta : Dwi Chandra Wacana, 2010), h. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

modal, perusahaan harus mengikuti sistem manajemen standar dan transparan.

Karakteristik usaha mikro berarti terdapat potensi masalah dan kelemahan. Hal tersebut telah menimbulkan berbagai permasalahan internal terutama yang berkaitan dengan dana, dan seperti yang sulit untuk mencari solusi yang jelas.⁴⁹

4. Kekuatan dan Kelemahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

UMKM memiliki berbagai potensi keunggulan yang akan menjadi dasar pengembangan ke depan yaitu:

- a. Penyediaan lapangan kerja harus mempertimbangkan, memperkirakan dan menyerap peran usaha kecil dalam menyerap tenaga kerja, hingga 50% dari tenaga kerja yang tersedia.
- b. Fakta membuktikan bahwa keberadaan UMKM merupakan sumber wirausaha baru dan dapat mendukung tumbuh kembang wirausaha baru.
- c. Miliki departemen bisnis pasar yang unik, lakukan manajemen sederhana dan tanggap terhadap perubahan pasar secara fleksibel.
- d. Industri kecil memanfaatkan sumber daya alam sekitar, dan sebagian besar memanfaatkan limbah atau produk dari industri besar atau industri lain.
- e. Ada potensi untuk berkembang. Hasil dari berbagai pekerjaan penyuluhan yang dilakukan menunjukkan bahwa industri kecil

⁴⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki kemampuan untuk lebih berkembang dan dapat mengembangkan departemen terkait lainnya.⁵⁰

Kelemahan, yang sering juga menjadi faktor penghambat dan permasalahan dari Usaha Mikro terdiri dari 2 faktor:

1. Faktor Internal, merupakan masalah klasik dari UMKM yaitu diantaranya:
 - a. Kapasitas sumber daya manusia masih terbatas.
 - b. Untuk pembatasan pemasaran produk, sebagian besar pengusaha industri kecil mengutamakan aspek produksi, namun fungsi pemasaran tidak dapat mengaksesnya, terutama dalam informasi pasar dan jaringan pasar, sehingga sebagian besar hanya dapat berperan sebagai pengrajin.
 - c. Tren konsumen yang tidak mempercayai kualitas produk industri kecil.
 - d. Karena keterbatasan modal komersial, sebagian besar industri kecil menggunakan modal sendiri dalam jumlah yang relatif kecil.
2. Faktor eksternal, merupakan permasalahan yang disebabkan oleh pihak pengembang dan pembina UMKM. Misalnya tujuan dari solusi yang diberikan tidak tepat sasaran serta tidak adanya monitoring dan program yang tumpang tindih.⁵¹

Dari kedua faktor tersebut terdapat gap antara faktor internal dan eksternal yaitu bank, BUMN dan lembaga pendukung lainnya bersedia memberikan kredit, namun karena UMKM harus memenuhi berbagai

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syarat maka UMKM menyediakannya. Di sisi lain, sulit pula bagi UMKM untuk mencari dan menentukan lembaga mana yang dapat membantu mereka mengatasi keterbatasannya sendiri. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk memudahkan peserta UMKM mendapatkan kredit, keadaan ini terus berlanjut, dan keadaan ini telah terjadi.

Pola yang ada sekarang adalah setiap lembaga / lembaga dengan fungsi yang sama, baik bank, BUMN, departemen, lembaga swadaya masyarakat, maupun swasta tidak saling berkoordinasi tetapi beroperasi secara independen. Di sisi lain, karena keterbatasan usaha kecil dan menengah, mereka menjadi tulang punggung perekonomian dan menjadi roda ekonomi untuk mewujudkan realitas.⁵²

⁵² *Ibid.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Restrukturisasi kredit di BRI Cabang Tuanku Tambusai menjadi bentuk penyelamatan kredit yang didahulukan oleh pihak bank karena dinilai lebih memberikan keuntungan daripada bentuk penyelamatan kredit yang lain serta dapat menekan kerugian pada bank sekasimal mungkin. Selain itu, apabila pelaksanaan restrukturisasi kredit berhasil maka kolektibilitas suatu kreditpun menjadi membaik. Hal ini semata-mata ditujukan untuk menjaga kelangsungan bank itu sendiri. Pelaksanaan restrukturisasi kredit pada debitur UMKM di BRI Cabang Tuanku Tambusai sudah berlaku sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang terdapat dalam peraturan mengenai perbankan dan perkreditan. Kendala yang dihadapipun masih tergolong tidak banyak dan masih dalam batas wajar sehingga masih bisa diatasi oleh bank.
2. Akibat hukum bagi debitur UMKM apabila restrukturisasi kredit gagal dilunasi adalah: Pertama, kredit yang sudah direstrukturisasi akan kembali statusnya menjadi kredit macet atau kredit bermasalah. Kedua, ketentuan mengenai hak dan kewajiban kreditur dan debitur dalam perjanjian restrukturisasi kredit juga diubah dengan pembaharuan perjanjian restrukturisasikredit.

B. Saran

Melihat kepada permasalahan yang ada dalam penelitian ini yang hasil dan pembahasannya sudah dijelaskan di atas, maka penulis mencoba memberikan beberapa saran yaitu:

1. Perlunya sosialisasi lebih mendalam dari pihak bank kepada debitur agar debitur mengetahui secara terperinci resiko-resiko apa yang akan timbul dari kredit yang bermasalah. Hal ini bertujuan agar tidak ada lagi gugatan oleh debitur kepada bank karena rasa tidak puas atas pelaksanaan pelelangan objek jaminan. Karena pada dasarnya, debitur tidak memiliki hak untuk memiliki objek jaminan tersebut apabila sudah masuk ke dalam proses pelelangan. Selain itu diperlukan juga ketelitian secara mendalam oleh pihak bank untuk menganalisis debitur secara keseluruhan, dengan lebih berhati-hati, sebelum terjadinya penunggakan kredit guna pelaksanaan restrukturisasi yang lebih efisien.
2. Perlunya persiapan yang matang dari debitur yang meliputi persiapan finansial dan jaminan serta mental. Hal ini perlu dipersiapkan untuk menghadapi resiko terburuk dalam pengajuan dan pelaksanaan kredit. Serta dibutuhkannya sikap yang kooperatif dan komunikatif terhadap permasalahan yang dialami agar pihak bank dapat segera memberikan solusi dan langkah penyelesaian kredit yang terbaik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Hajar. M, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau
- Haris Herdiansyah, 2010, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Malayu S.P Hasibun, 2004, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Munir Fuady, 2003, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung: Cita Adita
- Panji Anoraga, 2010, *Ekonomi Islam Kajian Makro Dan Mikro*, Yogyakarta : Dwi Chandra Wacana
- Santoso.R.T, 1996, *Kredit Usaha Perbankan*, Yogyakarta: Andi
- Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Jakarta: Alfabeta
- Supramono.G, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Jakarta: Rineka Cipta
- Sutarno, 2005, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung: Alfabeta
- Tulus. T.H. Tambunan, 2012, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, Jakarta: LP3ES
- V.Wiratna Sujarweni, 2014, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS
- Zainil Asikin, 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers

Undang- Undang dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 tentang Bank Rakyat Indonesia

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (POJK Stimulus Dampak Covid-19)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22 / PBI / 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

Surat Edaran Bank Rakyat Indonesia Nomor 12/DIR/ADK/5/2013 tentang Restrukturisasi Kredit

Skrisi dan Jurnal

Ade Resalawati, 2011, *Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UKM Indonesia*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Dwi Lia Setia Wati, 2020, *Efektifitas Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Sebagai Strategi Penurunan Kredit Bermasalah (Studi Kasus Pada BRI Unit Poncowati)*, IAIN Metro

Halim Alamsyah, 2021, *Restrukturisasi Perbankan dan Dampaknya Terhadap Pemulihan Kegiatan Ekonomi dan Pengendalian Moneter*, Buletin Ekonomi dan Perbankan

Nurasiah dan Mariani St.B Tanjung, 2019, *Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mitra Danagung Padang*, OSF Preprints, Center for Open Science

Situs

<https://bri.co.id/info-perusahaan>, diakses pada 23 Maret 2021

Deftyana Ainnur Alif, *Restrukturisasi Kredit, Baik atau Buruk bagi Bank?*, 2020, <https://kumparan.com/deftyana-ainnur-alif/restrukturisasi-kredit-baik-atau-buruk-bagi-bank-1tg0UBHSPix/full>, diakses pada 16 Oktober 2020

Detami Pradiksa, Gugatan dalam Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan oleh KPKNL, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-samarinda/baca-artikel/12786/Gugatan-dalam-Pelaksanaan-Lelang-Hak-Tanggungan-oleh-KPKNL.html>, diakses pada 11 Maret 2021

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN WAWANCARA

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK AKIBAT PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI KREDIT PADA DEBITUR USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI BANK RAKYAT INDONESIA CABANG TUANKU TAMBUSAI PEKANBARU

Berikut ini adalah pedoman wawancara yang berkaitan dengan penelitian tentang Perlindungan Hukum Bagi Bank Akibat Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Pada Debitur Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Bank Rakyat Indonesia Cabang Tuanku Tambusai Pekanbaru. Oleh karena itu, besar harapan saya agar Bapak/Ibu bersedia menjawab pertanyaan ini sesuai dengan fakta di lapangan.

Identitas mahasiswa

Nama : Nurvannisa Fajri Mustika

NIM : 11727202118

Jurusan/Fak/Univ. : Ilmu Hukum/ Syariah dan Hukum/ UIN Suska Riau

Pertanyaan

1. Apa saja kriteria debitur yang berhak mendapatkan restrukturisasi kredit?
2. Bagaimana tahapan-tahapan atau langkah-langkah dalam pemberian restrukturisasi kredit?
3. Dari semua tahapan itu, adakah biaya yang harus debitur tanggung?
4. Apa kendala dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit?
5. Setelah restrukturisasi kredit dilaksanakan, apakah masih ada debitur yang masih menunggak pembayaran kredit?
6. Apa yang menyebabkan debitur masih menunggak melunasi kredit yang sudah direstrukturisasi?
7. Apakah mungkin restrukturisasi kredit dilakukan dua kali?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Berapa persen keberhasilan pelaksanaan restrukturisasi kredit pada debitur UMKM?
9. Jika kredit yang sudah direstrukturisasi masih juga gagal untuk dilunasi oleh debitur, apa akibat hukum yang timbul?
10. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan pihak bank sebagai langkah terakhir untuk menyelamatkan aset bank?





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KUISIONER PENELITIAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK AKIBAT PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI KREDIT PADA DEBITUR USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI BANK RAKYAT INDONESIA CABANG TUANKU TAMBUSAI PEKANBARU

Berikut ini adalah kuisisioner yang berkaitan dengan penelitian tentang Perlindungan Hukum Bagi Bank Akibat Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Pada Debitur Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Bank Rakyat Indonesia Cabang Tuanku Tambusai Pekanbaru. Oleh karena itu, disela-sela kesibukan Bapak/Ibu saya memohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat mengisi kuisisioner berikut ini. Atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu, saya ucapkan banyak terima kasih.

1. Identitas mahasiswa

Nama : Nurvannisa Fajri Mustika
NIM : 11727202118
Jurusan/Fak/Univ. : Ilmu Hukum/ Syariah dan Hukum/ UIN Suska Riau

2. Identitas responden

Nama :
Jenis Usaha :

3. Petunjuk pengisian kuisisioner

- a. Isinya pertanyaan berikut sesuai dengan fakta yang terjadi
- b. Berikan tanda (X) atau silang pada pilihan jawaban A atau B
- c. Isilah jawaban titik-titik sesuai dengan jawaban Bapak/Ibu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERTANYAAN

1. Apakah Bank Rakyat Indonesia memberikan fasilitas restrukturisasi kredit kepada Anda?

Jawab: a.Ya
 b.Tidak

2. Apakah restrukturisasi kredit membantu memulihkan usaha Anda?

Jawab: a.Ya
 b.Tidak

3. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam melunasi kredit yang sudah dirstrukturisasi?

Jawab: a.Ya
 b.Tidak

4. Apakah Anda mendapatkan fasilitas restrukturisasi kredit yang kedua kali?

Jawab: a.Ya
 b.Tidak

5. Apa akibat yang akan Anda tanggung jika tidak dapat melunasi kredit yang sudah direstrukturisasi bahkan untuk yang kedua kali?

Jawab:.....

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Chudori, S.E



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebarto No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampar - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web: www.fahk.uin-suska.ac.id Email: fahk@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/222/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 05 Januari 2021

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NURVANNISA FAJRIMUSTIKA
NIM : 11727202118
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Bank Rakyat Indonesia Cabang Tuanku Tambusai Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang
berjudul : Perlindungan Hukum Bagi Bank Akibat Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Pada
Debitur Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bank Rakyat Indonesia Cabang Tuanku
Tambusai Pekanbaru

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lingsing Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 493 Telp. (0781) 39094 Fax. (0781) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RIS/36434
 TENTANG



1.04.02.01

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Penunjukan Riset dari : **DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU**, Nomor : **Un.04/F.I/PP.00.9/222/2020** Tanggal 5 Januari 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

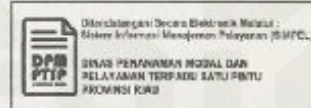
- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : NURVANNISA FAJRIMUSTIKA |
| 2. NIM / KTP | : 11727202119 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK AKIBAT PELAKSANAAN PEKANBARU STRUKTURISASI KREDIT PADA DEBITUR USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI BANK RAKYAT INDONESIA CABANG TUANKU TANBUSAI |
| 7. Lokasi Penelitian | : BANK RAKYAT INDONESIA CABANG TUANKU TANBUSAI |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data di atas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sepenuhnya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 7 Januari 2021



Tambahan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesenian, Budaya dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. PIMPINAN BANK RAKYAT INDONESIA CABANG TUANKU TANBUSAI
3. DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
4. Yang Berkepentingan

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul "*Perlindungan Hukum Bagi Bank Akibat Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Pada Debitur Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bank Rakyat Indonesia Cabang Tuanku Tambusai Pekanbaru*" yang ditulis oleh :

Nama : **NURVANNISA FAJRI MUSTIKA**
 NIM : 11727202118
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Telah dimunafasahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 24 Juni 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Daring/ Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munafasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Juni 2021 M
TIM PENGUJI MUNAFASAH

Ketua
Firdaus, SH., MH

Sekretaris
Basir, SHL., MH

Penguji I
Dr. Abu Samah, MH

Penguji II
Hj. Nuraini Sahu, SH., MH

Mengetahui:
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus. S.Ag.
 NIP. 19750801 200701 1 023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : NURVANNISA FAJRI MUSTIKA
NIM : 11727202118
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK AKIBAT PELAKSANAAN
 RESTRUKTURISASI KREDIT PADA DEBITUR USAHA MIKRO
 KECIL DAN MENENGAH DI BANK RAKYAT INDONESIA
 CABANG TUANKU TAMBUSAI PEKANBARU

Pembimbing: Firadaus, S.H, M.H

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 30 Juni 2021

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
 NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Nurvannisa Fajri Mustika, kelahiran Pekanbaru pada 20 April 1999. Anak pertama dari Ayahanda Novanri Historika dan Ibunda Ramayani. Pendidikan pertama penulis di SD Negeri 008 Tanjungpinang Timur dan lulus pada tahun 2011. Lalu penulis melanjutkan sekolahnya di MTs Negeri

Tanjungpinang dan lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan sekolah di SMA Negeri 1 Tembilahan Kota dan lulus pada tahun 2017. Penulis kemudian melanjutkan pendidikannya di jenjang perguruan tinggi di UIN Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Syariah dan Hukum dengan jurusan Ilmu Hukum konsentrasi Hukum Bisnis.

Penulis telah menyelesaikan program magangnya yang dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Pekanbaru pada tahun 2019. Kemudian program KKN dilanjutkan di Tembilahan Kecamatan Batang Tuaka pada tahun 2020.

Pada bulan Juni 2021 penulis melaksanakan penelitian di BRI Cabang Tuanku Tambusai Pekanbaru dengan judul “**Perlindungan Hukum Bagi Bank Akibat Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Pada Debitur Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Tuanku Tambusai Pekanbaru**”. Di bawah bimbingan bapak Firdaus, SH., MH. Dengan IPK 3.60.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.